

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah Kabupaten tanjung jabung timur adalah Salah satu daerah yang infrastruktur pembangunan jalan nya mengalami kerusakan yang cukup berat dan tidak memadai dibanding daerah lain yang ada di provinsi jambi. Akses jalan di kabupaten tanjung jabung timur pada tahun 2022 adalah sepanjang 1.177,77 Km.dengan kondisi jalan 57,31% dikategorikan sedang, akan tetapi mengalami penurunan sebesar 1,41% dari tahun 2020, Sebaliknya juga terjadi peningkatan kondisi jalan rusak berat. Sampai saat ini masih dikategorikan daerah yang tertinggal dalam segi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, Beberapa wilayah di kabupaten tanjab timur seperti di kecamatan mendahara merupakan wilayah pesisir dan merupakan sentra sentra perkebunan dan pertanian.¹

Jalan merupakan jalur dimana masyarakat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa diperlukan izin khusus untuk itu. Jalan merupakan prasarana transportasi yang sangat penting dalam menunjang segala kebutuhan manusia baik itu dalam kegiatan perekonomian dan sosial masyarakat. Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi dan merupakan daerah yang memiliki banyak jalan rusak. Jalan rusak di Tanjung Jabung Timur bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga mempengaruhi ekonomi wilayah tersebut.

¹ Bps.go.id, '*Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka*', Bps.Go.Id, 2022 <<https://tanjabtimkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/e9da606068fa49dad473fa32/kabupaten-tanjung-jabung-timur-dalam-angka-2022.html>>. Diakses pada 25 mei 2023

Kualitas infrastruktur jalan di beberapa wilayah yang ada di provinsi jambi masih dikatakan kurang baik, Bahkan kondisi jalan rusak dari tahun 2020 hingga 2022 terus mengalami peningkatan. Dari beberapa wilayah di provinsi Jambi, 11,51% di antaranya berada dalam kondisi rusak berat. Wilayah yang paling lama mengalami kerusakan adalah di wilayah Tanjung Jabung Timur yang merupakan wilayah dengan lahan rawa.²

Tabel 1.1

Kondisi jalan kabupaten/kota di provinsi jambi

No	Kabupaten/kota	Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat
1	Kota jambi	23,815	23,414	2,067	0,2
2	Bungo	23,8	76,889	5,6	0,88
3	Muaro jambi	35,6	57,3	20,194	16,2
4	Merangin	55,23	94,6	22,855	23,108
5	Batang hari	25,1	20,2	4,834	4,422
6	Tanjung jabung timur	18,7	37,3	7,7	36,207
7	Tebo	68,2	43,7	20,384	6,7
8	Kerinci	25,065	11,122	1,135	-
9	Sarolangun	17,3	91,8	31,005	31,1
10	Tanjung jabung barat	21,4	8,283	4	4,9
11	Kota sungai penuh	6,7	2,15	-	0,3

² Ade P Marboen, '11 Persen Jalan Provinsi Jambi Rusak Berat', Kamis, 8 Juli 2021 .sumber : <https://www.antaraneews.com> di akses pada 25 mei 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi 2022

Secara umum kondisi infrastruktur jalan yang terdapat di wilayah kabupaten tanjung jabung timur terdiri dari:

1. Jalan nasional : 46,55 km
2. Jalan provinsi : 99,91 km
3. Jalan kabupaten/kota : 1.177,77 km
4. Jalan dengan kondisi baik : 230,68 km
5. Jalan dengan kondisi sedang : 675,02 km
6. Jalan dengan kondisi rusak : 106,13 km
7. Jalan dengan kondisi rusak berat : 165,94 km

Infrastruktur jalan di kecamatan mendahara masih jauh dari kata baik, Kondisi jalan yang berlubang dan berlumpur sangat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, Mengingat infrastruktur jalan merupakan hal yang cukup penting maka masyarakat berharap pemerintah daerah dengan cepat memberikan sentuhan pembangunan di kecamatan mendahara. Masyarakat terus mengeluh akibat dari hancurnya jalan, mengingat jalan tersebut satu-satunya akses jalan yang digunakan kendaraan untuk beroperasi. Selain kondisi lubang yang cukup besar, kondisi lokasi macet cukup memprihatinkan karena basah dan berair sehingga akan sia-sia jika menggunakan batu kelas B.

“Dikutip dari informasi jambi independen Beberapa akses Jalan yang ada di kabupaten tanjung jabung timur terutama di kecamatan mendahara mengalami rusak parah, Karena kecamatan mendahara sebagian besar didominasi oleh daerah pesisir yang dapat

berdampak terhadap tingginya gelombang yang dapat mengancam pemukiman masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur jalan nya kerap terjadi kerusakan terutama saat air pasang tinggi ditambah dengan faktor cuaca”.³

Gambar 1.1

Gambar kerusakan jalan di kecamatan mendahara



Sumber : sekitarjambi.com

Salah satu penyebab kerusakan jalan dan terhambatnya pembangunan jalan yang ada di kecamatan mendahara tersebut ialah banyak nya angkutan kelapa sawit yang melintas melebihi kapasitas muatan, Kondisi ini juga diperparah oleh struktur tanah gambut di kecamatan mendahara yang mudah mengalami kerusakan, hal tersebut juga merupakan salah satu alasan mengapa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak memberikan akses kepada angkutan batu bara. Selain itu dibutuhkan nya pendanaan yang cukup besar untuk pembangunan yang ada di kecamatan mendahara mengingat kondisi tanah yang gambut yang mudah sekali

³ Savina Gita, “Gelombang tinggi di pesisir tanjab timur jalan di kelurahan mendahara ilir hancur”, Jambi independen.co.id, <https://jambiindependent.disway.id/read/655811/gelombang-tinggi-di-pesisir-tanjab-timur-jalan-di-kelurahan-mendahara-ilir-hancur>, Di akses pada 12 juni 2023

mengalami kerusakan. Adapun tentang pengawasan penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. Disebutkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang oleh kendaraan pengangkutan barang di luar kemampuan kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tabel 1.2

Kondisi jalan di kecamatan mendahara

No	Kondisi jalan	Jumlah
1	Baik	25,16
2	Sedang	58,242
3	Rusak ringan	38,231
4	Rusak berat	7,576
Jumlah		129,209

Sumber : Kecamatan Mendahara Dalam Angka 2022

Adapun tentang perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. Di sebutkan bahwa untuk memberikan pelayanan terhadap lalu lintas dan menunjang kelancaran

distribusi angkutan ke berbagai pelosok daerah, Pemerintah daerah telah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dengan ketentuan:

1. Badan hukum atau perorangan dapat membangun jalan dan/atau pengembangannya dengan memperhatikan kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Pembangunan dan/atau pengembangan jalan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil observasi awal dengan staf Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten tanjung jabung timur bahwasanya kebijakan dari Dinas PUPR sendiri telah mengusulkan dana inpres pada tahun 2023 sebesar 9 km dan untuk tahun 2024 dari pihak dinas PUPR juga telah mengusulkan kurang lebih 11 km untuk tahap pembangunan di kecamatan mendahara ,selain itu kerja sama dengan pihak perusahaan dalam hal ini ialah petro china juga telah dilakukan oleh dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menangani kerusakan jalan di kecamatan mendahara.⁴

Dengan ditetapkan nya kecamatan Mendahara sebagai wilayah yang diperingati melalui Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Perluasan Wilayah Jalan dan Jaringan. Secara khusus, Sub-lokal Mendahara yang mengalami kerusakan jalan yang serius akan segera mendapatkan pembiayaan dari otoritas publik melalui dana APBN dalam bentuk Alokasi Dana Khusus . Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur

⁴ Hasil Wawancara Staf Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tanjung Jabung Timur

mengatakan, upaya tersebut saat ini sedang memasuki tahap lelang di Kementerian PUPR.⁵

Sementara itu, ada dua titik ruas jalan yang mendapat bantuan inpres. Titik pertama berada di ruas jalan menuju ke Kecamatan Mendahara. Pekerjaan jalan yang akan ditangani sepanjang 9,065 kilometer dengan pagu anggaran sebesar Rp 46,6 Miliar. Selanjutnya, usulan titik kedua di ruas jalan menuju Kecamatan Kuala Jambi sepanjang 8,029 kilometer dengan pagu anggaran Rp 41,7 miliar rupiah.⁶

Kecamatan mendahara masuk ke dalam daerah yang mendapatkan dana inpres dikarenakan telah memenuhi kriteria prioritas pembangunan jalan melalui inpres jalan daerah yang meliputi kriteria sebagai berikut:

1. Dukungan terhadap kawasan strategis, Merupakan daerah yang mendukung produktivitas kawasan industri, pariwisata, perkebunan, pertanian, dan produktif lainnya.
2. Tingkat kemantapan jalan, Merupakan daerah yang memiliki kondisi tidak mantap (kondisi rusak ringan/rusak berat.
3. Konektivitas jaringan transportasi, Merupakan Jalan daerah yang terhubung dengan status lebih tinggi dan Jalan daerah yang mendukung jalur logistik dan simpul transportasi.

⁵Amazihono Novianti, "Benarkah Jalan Rusak di Kecamatan Mendahara Dan Kuala Jambi di Perbaiki Dengan Dana APBN?Ini Kata Dinas PUPR Tanjabim". <https://www.lihatjambi.com/> Di akses pada 17 november 2023

⁶ Anas al hakim," 2 Ruas Jalan Rusak di Tanjabtim Jambi Masuk Inpres, Sudah Tahap Lelang di Kementerian PUPR". <https://jambi.tribunnews.com/2023/07/05/2-ruas-jalan-rusak-di-tanjabtim-jambi-masuk-inpres-sudah-tahap-lelang-di-kementerian-pupr>

“Di kutip dari metro jambi pemerintah kabupaten tanjung jabung timur telah melakukan kerja sama atau melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten tanjung jabung timur agar ikut serta langsung dalam penanganan kerusakan jalan di wilayah kerja yang di lewati.hal tersebut dianggap bahwa perusahaan masih kurang tanggap dalam masalah perbaikan jalan tersebut”.⁷

Untuk menanggapi hal tersebut dari pihak perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk membantu pemerintah tanjab timur dalam penanganan pembangunan infrastruktur jalan yang rusak, Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari Pt EWF, WKS, Petro China, Mendahara agro jaya abadi, Lading sawit sejahtera, Perwakilan PTPN, Dan agrotamex sumindo abadi. Hal tersebut dapat di buktikan Dari informasi radar jambi yang menyatakan bahwa Kontaktor kontrak kerja sama (KKKS) Petro china international jabung bersama dengan SKK Migas telah menyerahkan bantuan program pengembangan masyarakat (PMM). Bantuan tersebut telah diserahkan kepada pemkab tanjab timur yang mencakup tujuh program dengan nilai Rp 16.798.457.400.

Melalui program-program tersebut merupakan salah satu bentuk kerja sama nyata yang dilakukan pihak perusahaan dalam membantu dan ikut serta pembangunan infrastruktur jalan yang ada di kabupaten tanjung jabung timur.⁸ Karna dalam proses pengambilan kebijakan pihak perusahaan atau swasta memiliki peran penting demi

⁷ Metro jambi,”Pekab tanjab timur minta perusahaan besar bantu perbaikan jalan”, <https://www.metrojambi.com/daerah/13558006/Pekab-Tanjab-Timur-Minta-Perusahaan-Besar-Bantu-Perbaikan-Jalan>, Di akses pada 14 juni 2023

⁸ Radar jambi,”SKK Migas-KKKS Perto China serhkan tujuh program pengembangan masyarakat ke pemkab tanjab timur”, <https://radarjambi.co.id/read/2023/03/22/29876/skk-migas--kkks-petrochina-serahkan-7-program-pengembangan-masyarakat-ke-pemkab-tanjab-timur-ini-d/> Di akses pada 14 juni 2023

terwujudnya keputusan kebijakan yang benar benar dapat bermanfaat baik bagi kehidupan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemkab Tanjabtim, jalan yang sudah di timbun masih saja tetap hancur, dikarenakan banyak kendaraan yang memaksa ingin lewat dan terlalu banyaknya muatan yang di angkut oleh truk-truk pengangkut barang, khususnya untuk truk pengangkut kelapa sawit yang terlalu berat sehingga mengakibatkan jalan kembali hancur. Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah meningkatnya biaya transportasi. Jalan yang rusak dapat membuat kendaraan menjadi lambat dan boros bahan bakar, sehingga biaya transportasi menjadi lebih mahal. Selain itu, perjalanan memakan waktu lebih lama karena kecepatan kendaraan menjadi lambat akibat jalan yang tidak mulus. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah menurunnya daya saing ekonomi. Jalan yang rusak membuat sulitnya mengirim barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga meningkatkan biaya logistik dan menurunkan keuntungan bagi pelaku ekonomi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut.⁹

Pembangunan infrastruktur dapat dikatakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang tujuannya sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Yang berarti bahwa pembangunan itu harus bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan di Indonesia dan pemenuhan

⁹ Deo eka saputra "Keadaan Jalan di Tanjung Jabung Timur Mengakibatkan Kemacetan" <https://jamberita.com/read/2023/05/21/5978104/keadaan-jalan-di-tanjung-jabung-timur--mengakibatkan-kemacetan->. Di akses pada 23 Juni 2024

kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga hasil pembangunan tersebut berdampak positif bagi kehidupan masyarakat seperti perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.¹⁰

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendukung pembangunan di Indonesia, penyediaan investasi untuk pembangunan infrastruktur merupakan peranan penting bagi pemerintah. Akan tetapi anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur jalan tersebut merupakan anggaran yang cukup besar dibanding dengan pembangunan di sektor lain, hal ini dikarenakan pergerakan barang dan orang yang dilayani oleh transportasi jalan sekitar 70%, yang berarti bahwa pembangunan infrastruktur jalan memberikan dominasi yang cukup besar bagi pergerakan barang dan orang. Dengan tingginya aksesibilitas, transaksi antara produsen dan konsumen akan semakin mudah dan biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah.¹¹

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan kepada kesejahteraan rakyat, agar kemajuan pembangunan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini Implementasi merupakan tahapan realisasi pembentukan sasaran dan tujuan suatu pembangunan dengan memperhatikan persiapannya dan memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi baik kegagalan maupun keberhasilan serta tantangan yang akan dihadapi. Kebijakan

¹⁰Admin ekbangsekda, '*Infrastruktur Jalan Di Pedesaan*', 12 Februari 2020, <<https://ekbangsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/infrastruktur-jalan-di-pedesaan-63>>.Diakses pada 25 Mei 2023

¹¹ Kurniasih Denok Chasanah Khuswatun, Rosyadi Slamet, '*Implementasi Kebijakan Dan Dana Desa*', Jurnal Administrasi Publi, Vol. 3 No. 2, (2017).

tersebut merupakan suatu hal yang lazim untuk di pikirkan,di desain,dirumuskan serta diputuskan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut pemerintah juga harus memberikan perhatian nya kepada pembangunan di daerah agar tidak terjadi ketimpangan.

Berdasarkan Undang-undang dasar pemerintah daerah Nomor 23 tahun 2014, yang merupakan peluang yang cukup besar terhadap percepatan pembangunan yang ada di daerah dengan kewenangan yang lebih luas untuk merumuskan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan yang mandiri sesuai asas otonomi daerah. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan fokus dari pemerintah sejak awal kemerdekaan,akan tetapi dari waktu ke waktu strategi pembangunan tersebut telah mengalami banyak perubahan,mulai dari segi perubahan fisik hingga perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat nya.salah satu hal yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan nya ialah melalui kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah, agar dapat membangun perencanaan yang baik bersama masyarakat dengan mengedepankan gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan serta keadilan sosial. Hal tersebut merupakan bentuk kemandirian, keterampilan dan pengetahuan sebagai upaya untuk menetapkan suatu kebijakan, kegiatan dan program yang sesuai dengan permasalahan serta kebutuhan masyarakat.¹²

Penelitian yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan sudah ada beberapa penelitian sebelumnya diantaranya:

¹²Kessa Wahyudin, *Perencanaan Pembangunan Desa* (jakarta:kementrian desa,pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia, 2015).

Pertama, penelitian oleh Alden laloma, Christin dessy sahudege, dan Burhanuddin kiyai, pada tahun 2015, fokus penelitiannya mengenai “Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dalam pengembangan ekonomi masyarakat di kabupaten sorong papua barat”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari segi pengembangan ekonomi maupun pelaksanaan infrastruktur jalan nya sudah bisa dikatakan baik dan berjalan sesuai harapan. akan tetapi keterbatasan anggaran dari APBN maupun APBD menjadi faktor utama penghambat implementasi pembangunan infrastruktur jalan dan perekonomiannya, walaupun demikian untuk meningkatkan taraf hidup nya masyarakat kabupaten sorong memanfaatkan berbagai sektor yang ada melalui visi dan misi nya.¹³

Kedua penelitian yang di lakukan oleh Sadikin, Sjuaib Hannan, Ulya Sunani, yang berjudul “Peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan ulumanda”. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, konsekuensi dari pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan wilayah kekuasaan Majene berperan sesuai dengan Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 yang memuat pemerintahan provinsi. Inti dari eksplorasi ini adalah untuk mengetahui elemen-elemen apa saja yang mendukung dan menghambat kerja pemerintah lingkungan dalam menciptakan kerangka jalan

¹³ Laloma Alden, Sahudege Dessy Christin, Kiyai Burhanuddin, ‘Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat’, Jurnal Administrasi Publik, Vol 4. No 32. (2015).

untuk menggarap bantuan pemerintah terhadap masyarakat di Subkawasan Ulumanda.¹⁴

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Tantri naratama, Andi maysarah, Rina melati sitompul, yang berjudul “Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur pada dusun XV Kurandak Kecamatan Labuhan Deli”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pembangunan memiliki wewenang dalam merealisasikan meyelenggaraan pemerataan pembangunan, akan tetapi pemerataan pembangunan tersebut belum dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁵

Seluruh penelitian sebelumnya mengkaji tentang Pembangunan yang ada di daerah masing-masing dengan permasalahan pembangunan dan fokus yang berbeda beda pula, Adapun perbedaan nya dengan penelitian terdahulu diatas adalah penelitian ini memfokuskan kepada pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten tanjung jabung timur terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang ada di kecamatan mendahara guna membenahi kerusakan jalan tersebut, dengan adanya permasalahan tersebut peneliti melihat bahwa pembangunan infrastruktur jalan menjadi tolak ukur dan sangat berpengaruh dalam segala bidang

¹⁴ Sadikin, Hannan Sjuuib, Sunani Ulya. ”Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ulumanda”, Jurnal Pegguruang Conference Series.Vol. 3, No 2. November 2021

¹⁵ Naratama Tantri, Maysarah Andi, Rina Melati Sitompul, “Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan Infrastruktur pada dusun XV Kurandak Kecamatan Labuhan Deli”, Jurnal Dharmawangsa, Vol 17. No 3. Juli 2023

dan juga merupakan alat transportasi untuk masyarakat dan barang yang tentunya dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat tersebut. Dalam hal ini berdasarkan pokok permasalahan di atas merupakan hal yang penting untuk teliti agar dapat mengetahui gambaran yang lebih komprehensif mengenai “**Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan mendahara**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka di daparkan rumusan permasalahan penelitian di antaranya sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana bentuk kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten tanjung jabung timur terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan mendahara?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi dari kebijakan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang ada di kecamatan mendahara?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dilakukannya penenlitian ini adalah :

- 1.3.2 Untuk menganalisis apakah kebijakan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur sudah sesuai dengan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan mendahara.

- 1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan mendahara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini, berdasrakan tujuan-tujuan penelitian di atas baik kegunaan teoritis dan praktis sebagai unsur yang tidak dapat terpisahkan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan teoritis

Hasil penelitian di harapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi pemerintah kabupaten tanjung jabung timur terkhususnya mengenai pembangunan infrastruktur jalan yang perlu di benahi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan bagi pemerintah daerah dan aparat yang terkait, dalam proses pembangunan infrastruktur jalan, serta memberikan informasi seberapa pentingnya pembangunan infrastruktur jalan di suatu daerah.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan publik, bukan tujuan-tujuan rakyat atau perkumpulan yang tidak berkesudahan. Padahal sebagai sebuah alat, kehadiran kebijakan publik merupakan hal yang vital dan kritis. Hal ini penting karena kehadirannya menentukan tercapainya suatu tujuan, padahal masih ada beberapa tahapan penting atau berbeda yang harus dipenuhi sebelum mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁶

Kebijakan publik merupakan kedudukan otoritas publik untuk melaksanakan kewajiban dan kemampuannya yang sebanding dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya, Kebijakan pemerintah dalam membenahi kehidupan individu dari berbagai sudut pandang adalah pengaturan yang berpihak pada kepentingan masyarakat pada umumnya. Arti kebijakan adalah pedoman atau cara kegiatan yang diputuskan untuk mengkoordinasikan arah. Masing-masing definisi pendekatan terbuka dimulai dengan merinci permasalahan yang telah diketahui dan selanjutnya pelaksanaan pengaturan diarahkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di mata publik.

Seperti yang ditunjukkan oleh Charles O. Jones, istilah kebijakan digunakan dalam praktik normal tetapi digunakan untuk menggantikan praktik atau pilihan yang sama sekali berbeda. Istilah ini sering digunakan secara timbal balik dengan tujuan,

¹⁶ Rusli Budiman, 2013 *“Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif”* (Jawa Barat :Hakim Publishing), Hlm.9

program, pilihan, prinsip, proposisi dan rencana hebat. Meskipun demikian, meskipun strategi publik mungkin tampak unik atau mungkin dipandang sebagai sesuatu.

Sholichin Abdul Wahab, sebagaimana dikutip Suharno, menyarankan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai gagasan kebijakan publik sebagai kegiatan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memisahkan kebijakan ke dalam beberapa klasifikasi, antara lain:

- a. Tuntutan kebijakan, khususnya permintaan atau ketegangan yang dilakukan terhadap otoritas pemerintah oleh pihak-pihak yang berbeda, baik pihak yang bersifat rahasia maupun otoritas publik itu sendiri dalam kerangka politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya tidak melakukan tindakan terhadap suatu isu tertentu. . Permintaan-permintaan tersebut bisa saja berubah, dari permintaan umum agar otoritas publik melakukan sesuatu, menjadi usulan untuk mengambil langkah-langkah spesifik yang substansial terkait dengan isu yang terjadi di ranah publik.
- b. Keputusan kebijakan adalah pilihan yang dibuat oleh otoritas pemerintah yang direncanakan untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan pengaturan publik. Dalam hal ini termasuk pilihan untuk membuat peraturan (pengaturan dasar), deklarasi, atau membuat pemahaman terhadap peraturan.
- c. Pernyataan kebijakan adalah proklamasi atau klarifikasi yang sebenarnya mengenai pengaturan publik tertentu. Contohnya; Pilihan MPR, Deklarasi Resmi atau Pengumuman Resmi, pilihan hukum, penjelasan atau pidato

oleh otoritas pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan, dan cara otoritas publik mencapai tujuan tersebut.

- d. Keluaran kebijakan merupakan jenis kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena mencakup hal-hal yang benar-benar tuntas untuk mengakui apa yang telah tergambar dalam pilihan-pilihan pengaturan dan artikulasinya. Jadi, kebijakan ini menghasilkan kekhawatiran tentang apa yang perlu dilakukan oleh otoritas publik.
- e. Hasil akhir dari kebijakan adalah hasil atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh daerah setempat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diperkirakan sebagai akibat dari aktivitas atau kelambanan otoritas publik terhadap wilayah atau permasalahan tertentu ada di mata publik.¹⁷

Menurut Solichin, dalam menganalisis suatu kebijakan di perlukan adanya sebuah pendekatan diantaranya :

1. Pendekatan proses. Analisis kebijakan mengidentifikasi proses kebijakan, kemudian di lanjutkan dengan menganalisis faktor-faktor penentu dalam setiap tahapan nya. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan seleksi untuk dipilih diimplementasikan oleh aparat pemerintah dalam intansi tertentu, dievaluasi dan diubah berdasarkan evaluasi atas keberhasilan atau kekurangan.

¹⁷ Taufiqurokhman. 2014 *“Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan”*. (Jakarta pusat : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (pers)). Hlm 5-6.

2. Pendekatan historis. Tujuan utamanya adalah mengamati kebijakan berdasarkan pengalaman waktu.
3. Pendekatan partisipatif. Tujuan utamanya ialah mengamati peranan banyak aktor pembuatan kebijakan.¹⁸

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan:

- a. Kebijakan umum (strategi) Kebijakan umum (strategi) Tingkat strategi secara keseluruhan merupakan tingkatan yang diperluas melalui pengelompokan masalah-masalah penting yang berskala besar untuk mencapai impian masyarakat dalam situasi dan kondisi tertentu.
- b. Kebijakan manajerial, merupakan batas suatu wilayah fundamental (wilayah penting) pemerintahan. Pendekatan ini merupakan penjabaran dari pengaturan umum untuk menetapkan metodologi, manajemen kebijakan, dan sistem di bidang-bidang mendasar tersebut. Pada tingkat tinggi, kepemimpinan mempunyai wewenang atas kebijakan manajerial.
- c. Kebijakan teknis operasional, menggabungkan batas-batas publik dengan melihat wilayah fundamental di atas sebagai kerangka dan teknik untuk melaksanakan rencana, usaha dan kegiatan. Situasi untuk memberikan tindakan yang luar biasa terletak pada pimpinan eselon utama divisi pemerintahan dan kepala lembaga non-departemen. Hasil sertifikasi vital

¹⁸ Solichin Abdul Wahab, “Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik”, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 46.

tersebut berbentuk peraturan, keputusan, peraturan dari kuasa yayasan nondepartemen atau peraturan dari Direktur Utama di setiap wilayah administratif yang mereka kuasai.¹⁹

Studi kebijakan publik menerapkan beberapa siklus, termasuk pelaksanaan strategi. Eksekusi strategi publik merupakan interaksi yang rumit, termasuk aspek hierarkis, inisiatif, dan administratif dari otoritas publik sebagai pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan publik harus dilakukan dengan memikirkan berbagai elemen, sehingga kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk memahami asumsi-asumsi yang ideal.²⁰

implementasi berpusat pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh otoritas dan organisasi dalam rangkaian administrasi yang diberikan kepada daerah setempat. Implementasi adalah suatu proses pemahaman dan penyesuaian terhadap prasyarat. Syaratnya, hal itu terjadi setelah suatu program dinyatakan menarik atau terealisasi, khususnya sebagai latihan atau kejadian yang muncul setelah pedoman tersebut disahkan, baik dalam bidang regulasi maupun menimbulkan akibat atau akibat yang nyata bagi masyarakat.

¹⁹ Mustari Nuryanti. 2015 “*Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Kebijakan Publik*” (Yogyakarta : LeutikaPrio). Hlm.1-16.

²⁰ Header Akib, “*Implementasi kebijakan*”, Jurnal Administrasi Publik, universitas negeri Makassar. Vol. 1 No. 1. 2010, hlm. 10.

Tahap-tahapan dalam proses implementasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Output-output kebijakan (keputusan) dari badan-badan pelaksana.
- b. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
- c. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana.
- d. Persepsi terhadap dampak keputusan tersebut.
- e. Evaluasi system politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan mendasar atau upaya untuk melaksanakan perbaikan dalam muatan/isinya.²¹

Selanjutnya George C. Edward III mengemukakan 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu diantaranya :

1. Komunikasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan yang efektif mengharapakan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa tujuan dan sasaran pengaturan yang harus disampaikan pada kelompok sasaran (*target group*) sehingga lika-liku pelaksanaan akan berkurang. Jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui, kemungkinan besar akan ada pertentangan dari kelompok tujuan.

²¹ Solichin Abdul Wahab, *op. cit.* hlm. 203

2. Sumber daya

Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kemampuan pelaksana dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah adalah komponen penting untuk pelaksanaan pengaturan yang kuat. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di arsip kertas

3. Disposisi

Disposisi adalah pribadi dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti tanggung jawab, sifat berdasarkan popularitas. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai sikap yang baik maka ia akan menyelesaikan kebijakan dengan baik sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang dipercayakan untuk melaksanakan kebijakan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, Salah satu bagian penting dari struktur organisasi adalah adanya standar teknik kerja (SOP). SOP merupakan aturan bagi setiap pelaksana kebijakan dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang sering kali akan melemahkan pengawasan dan menambah kebisingan administratif, khususnya prosedur peraturan yang rumit dan kompleks.²²

²² Deddy Mulyadi, *op. cit.* Hlm. 68-69

1.5.2 Pembangunan

Pembangunan menurut siagian merupakan sebuah arah atau rangkaian usaha perkembangan dan terencana na suatu perubahan yang di lakukan oleh sebuah bangsa, dan secara sadar menuju modernitas dalam hal pembinaan bangsa. Bryant dan white mengemukakan bahwa pembangunan merupakan salah satu upaya peningkatan manusia dalam rangka mempengaruhi masa depan mereka, terdapat lima implikasi dalam penerapan nya yang terdiri atas:

- a. Pembangunan yang memiliki arti sebagai pembangkit kemampuan manusia secara optimal, baik kelompok maupun secara individu.
- b. Pembangunan yang mendorong kebersamaan, perataan nilai dan kesejahteraan.
- c. Pembangunan yang menaruh kepercayaan kepada masyarakat yang meliputi kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan dalam memutuskan sesuatu yang berdasarkan kemampuan mereka sendiri dalam membangun dirinya.
- d. Pembangunan untuk membangkitkan kemampuan secara mandiri.
- e. Pembangunan yang berarti dapat mengurangi ketergantungan terhadap Negara lain, serta menciptakan hubungan yang saling menghormati dan menguntungkan.

Pembangunan dapat dikatakan suatu proses perubahan secara sadar dan terus dilakukan agar tercapainya kemajuan dan perbaikan taraf hidup kearah positif, oleh karena itu ada beberapa unsur yang terkandung dalam pembangunan, diantaranya:

- a. Perubahan: perubahan yang masih dianggap kurang dalam menuju kesempurnaan.
- b. Tujuan: yaitu tujuan yang terarah menuju kesejahteraan, pelestarian, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik.
- c. Potensi: yaitu terdapat potensi dalam masyarakat tersebut yang kemudian bias digunakan sebagai pendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.²³

1.5.3 Pembangunan infrastruktur jalan

Menurut Rosik pembangunan infrastruktur terutama pembangunan jalan akan berdampak secara langsung terhadap output suatu daerah, dan merupakan kebutuhan akan adanya investasi baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Moteff mendefinisikan infrastruktur bukan hanya sebatas mengenai sudut pandang ekonomi saja akan tetapi juga berkaitan dengan pertahanan dan keberlanjutan pemerintah. Sedangkan vaughn dan pollard berpendapat bahwa secara umum infrastruktur meliputi jalan, bandar udara, pelabuhan, jembatan, bangunan umum, dan lain sebagainya.²⁴

Menurut Kenastri terdapat tiga jenis infrastruktur pekerjaan umum di indonesia yaitu diantaranya:

²³ Suryono Agus, 2010, *Dimensi-dimensi prima dan teori pembangunan* (Malang: Univesitas Brawijaya Press). Hlm. 2-4.

²⁴ Prapti Lulus Rr, Suryawardana Edy, Triyani Dian. 'Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 17 NO. 2 (2015).

1. Infrastruktur jalan

Merupakan infrastruktur yang sangat penting dan memiliki fungsi sebagai penghubung antar daerah satu dengan daerah lainnya. Selain itu infrastruktur jalan juga berperan penting terhadap pembangunan ekonomi nasional dan memiliki kontribusi yang cukup besar.

2. Infrastruktur Pengairan

Merupakan infrastruktur yang juga terkait langsung dengan pembangunan di sektor lain, dan merupakan penopang atau penopang dalam pembangunan lain seperti memberikan dukungan substansial untuk pembangunan pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air baku perkotaan dan industri, perkebunan, dan pembangkit listrik tenaga air.

3. Infrastruktur air minum dan sanitasi

Kebutuhan akan air digunakan untuk memenuhi kehidupan hayati secara langsung yang diperlukan untuk produksi makanan. Kebutuhan akan air menyangkut dua hal bagi kehidupan manusia yaitu sebagai makhluk hayati dan sebagai manusia yang berbudaya.

Menurut Oglesby dan Hicks Jalan memiliki fungsi yang bersifat majemuk yang dapat berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan pokok

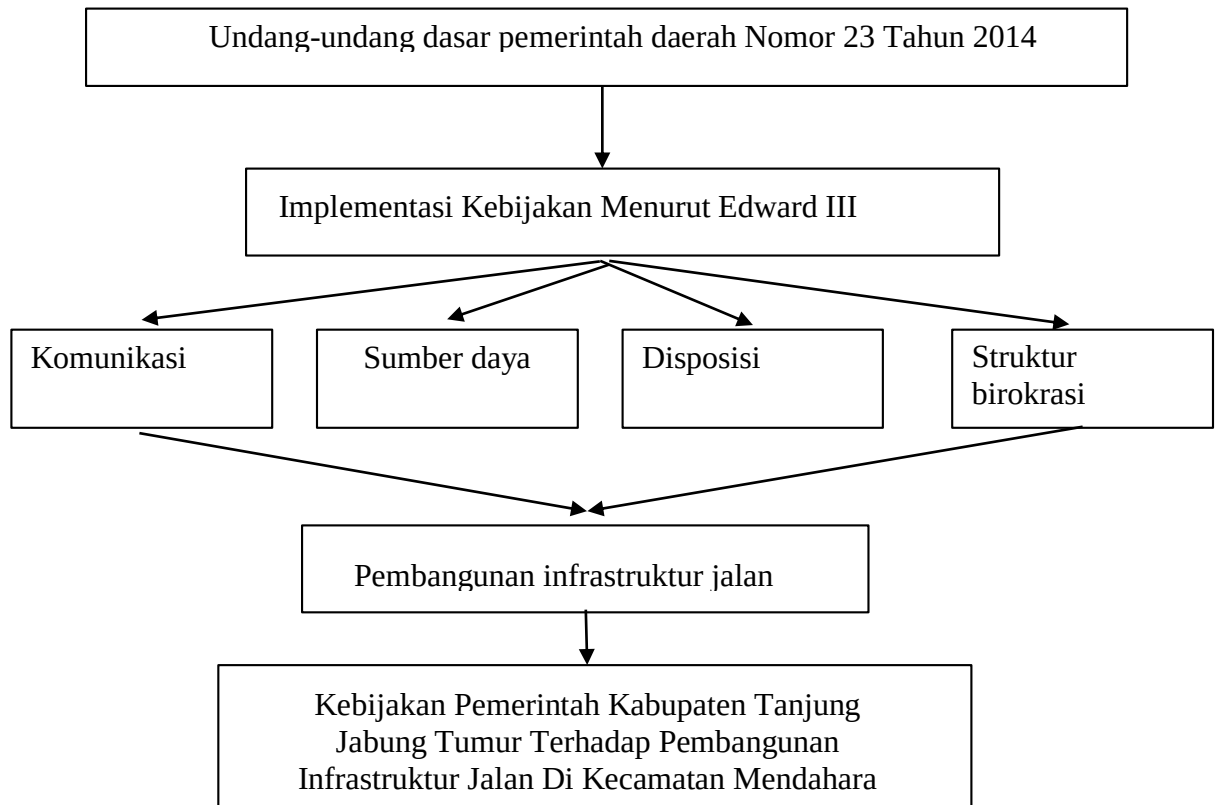
pemerintah, meningkatkan mobilitas yang ada di masyarakat, memberikan pergerakan kepada setiap lingkungan maupun jalan masuk ke tempat tinggal masyarakat.²⁵

Adapun yang menjadi Tujuan dan fungsi jalan antara lain:

1. Sebagai penghubung jalan masuk antar wilayah yang disebut juga dengan *land acces* yang memiliki peran penting dalam peningkatan PDRB dan pengurangan daerah tertinggal.
2. Sebagai pelayanan masyarakat setempat dalam proses pendistribusian produk maupun kegiatan masyarakat lainnya yang dapat memberikan melalui jasa-jasa.
3. Sebagai pelayanan bagi angkutan jarak jauh maupun antar kota .

²⁵ Rengu Pani Stefanus, Asariansyah Faisal Muhammad, Saleh Choirul, '*Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan*', Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 6 (2013).

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang didasarkan pada suatu metodologi untuk menyelidiki fenomena sosial dan permasalahan manusia.²⁶

Metodologi kualitatif dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Mulai dari mendapatkan informasi hulu

²⁶ Murdiyanto Eko. 2020 "*Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*" (Yogyakarta: Lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat UPN Veteran).

hingga hilir hingga memasukkan sumber data, alasannya adalah penataan dapat dilakukan dengan efisien, tepat dan autentik dengan mempertimbangkan realitas terkini dan sifat kemajuan di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah Tanjung Jabung Timur terhadap perbaikan infrastruktur jalan di wilayah kecamatan Mendahara..

1.7.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai wilayah yang memiliki infrastruktur jalan yang kurang memadai, dilakukan mulai februari 2024 hingga penyempurnaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan data yang masuk akal dan lengkap, serta memudahkan para ilmuwan dalam menyebutkan fakta objektif.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif maupun naratif, seperti persepsi, pengalaman, serta pandangan dari narasumber. untuk mengidentifikasi dan mengetahui kesesuaian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten tanjung jabung timur terhadap pembangunan infrastruktur jalan, dan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten tanjung jabung timur mengenai pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan mendahara.

1.7.4 Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang di dapat melalui kunjungan atau wawancara langsung kepada pemangku kepentingan maupun masyarakat setempat yang berada disekitar lokasi penelitian.
 1. Wawancara dilakukan dengan Bupati tanjung jabung timur dan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai pemangku kepentingan di Dinas PUPR Kabupaten Tanjab timur, serta masyarakat yang merasakan langsung dampak pembangunan tersebut. Wawancara dapat dikatakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait pengalaman, persepsi, dan pandangan informan mengenai pembangunan infrastruktur jalan.
 2. Observasi langsung terhadap perbaikan pondasi jalan di wilayah Tanjab Timur. Observasi dilakukan dengan menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung mengenai suatu keanehan atau suatu hal yang perlu dipelajari. Dalam hal ini, para ahli dapat melihat dengan jelas bagaimana pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah Tanjung Jabung Timur terhadap perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Mendahara, seperti teknik pembangunan pondasi jalan, pelaksanaan strategi, dan cara pengambilan keputusan.
- b. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari kantor-kantor yang berhubungan langsung dengan kajian yang digali sebagai informasi program

pendidikan atau sebagai catatan, laporan atau tulisan dan sumber tertulis lainnya.²⁷

1. Data statistik dari Dinas PUPR kabupaten tanjab timur. Terkait jumlah kerusakan jalan, yang dapat menjadi sumber data sekunder untuk memperoleh informasi terkait kerusakan jalan dari waktu ke waktu.
2. Laporan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dapat menjadi sumber data sekunder untuk mendapatkan informasi terkait proses pembangunan infrastruktur jalan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah lain. Informasi ini dapat menjadi acuan dalam perumusan kerangka teori dan hipotesis penelitian.
3. Artikel jurnal ilmiah terkait pembangunan infrastruktur jalan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah lain. Dapat menjadi sumber data sekunder untuk memperoleh gambaran tentang keadaan yang ada, baik secara historis maupun saat ini, sehingga dapat menjadi landasan untuk membandingkan dan mengembangkan penelitian selanjutnya.

1.7.5 Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan beberapa informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang dilakukan

²⁷*ibid.* hal 53.

secara langsung dan terstruktur. Terdapat tiga rangkaian wawancara menurut Seidman, yaitu:

1. wawancara dengan mengungkap konteks pengalaman partisipasi.
2. memberi kesempatan kepada partisipan untuk merekonstruksi pengalamannya.
3. mendorong partisipan dalam merefleksikan pengalaman yang dimiliki.

b. observasi

Observasi (pengamatan langsung) merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara sistematis dari fenomena yang sedang diteliti. Selain untuk menunjang data-data observasi ini juga dilakukan untuk mengetahui realisasi proses pelaksanaan kegiatan maupun program yang telah dilaksanakan. Adapun tujuannya ialah untuk dapat mengamati berbagai situasi dan kondisi pada objek penelitian yang ada di dinas PUPR tanjab timur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber informasi tersusun yang terdiri atas sumber resmi dan sumber informal. Sumber resmi terdiri dari arsip-arsip yang dibuat atau diberikan oleh Dinas PUPR Tanjab Timur, sedangkan sumber informal terdiri dari arsip-arsip yang dibuat atau diberikan oleh orang-orang tertentu. Informasi naratif berupa foto

dan rekaman yang diperoleh selama penelitian lapangan, dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian kebenaran pemeriksaan yang telah dilakukan.

1.7.6 Teknik penentuan informan

Penentuan sumber informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Dengan menggunakan strategi pemeriksaan purposif, pemeriksaan terhadap sumber informasi dilakukan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Intinya adalah menentukan saksi-saksi yang akan dijadikan sumber data. Sumber yang dipilih dianggap mempunyai informasi yang dapat diterapkan pada eksplorasi yang dipimpin. Prinsip utama dalam memilih saksi adalah mereka adalah orang-orang yang dapat memberikan data mengenai apa yang dibutuhkan oleh analis. Penjelasan nya adalah untuk menjamin saksi terpilih dapat memberikan data yang aplikatif dan tepat serta sesuai dengan pokok persoalan yang diselidiki.

Narasumber menurut Moleong adalah orang yang paling tahu tentang masalah yang akan diteliti dan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lapangan.²⁸ Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa informan diantaranya:

NO	Informan	Jabatan	Keterangan
1	Dinas PUPR	Kepala bidang bina marga dinas PUPR Kabupaten	merencanakan, melaksanakan, dan membina pembangunan, peningkatan,

²⁸ *ibid.* hal 52.

		tanjung jabung timur	dan pemeliharaan jalan dan jembatan
2	Camat	Camat kecamatan mendahara	sebagai pimpinan di desa cukup intens sebagai sumber informasi karena lokasi yang akan di teliti lebih dekat.
3	Masyarakat	Tokoh masyarakat	Pengguna jalan

1.7.7 Teknik analisis data

Teknik analisis data digambarkan dalam bentuk pelacakan, dan kesiapan dilakukan dengan efisien, termasuk catatan lapangan, catatan wawancara, dan materi lain yang dapat mendukung para ilmuwan dalam memperkenalkan penemuan mereka. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga fase dalam tahap analisis data yang harus dimungkinkan, khususnya:

1. Reduksi data

Adalah proses pengumpulan dan penyederhanaan data agar dapat diolah serta mempermudah analisis data, hal tersebut dilakukan melalui sebuah proses pemilihan, pengabstraksian, pemusatan perhatian, serta transformasi data kasar dari lapangan.

2. Penyajian data

Adalah proses yang menyajikan informasi yang di susun mulai dari proses rangkuman data, memvisualisasikan data tersebut dalam bentuk tabel maupun diagram untuk memberikan kemungkinan dalam penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan secara naratif.

3. Kesimpulan dan verifikasi.

Penarikan kesimpulan dan juga verifikasi dilakukan sesuai dengan kebenaran yang diperoleh di lapangan sehingga validitasnya dapat terjamin. Kemudian melakukan berbagai cara dalam mengkonfirmasi makna yang diperoleh di lapangan dengan tujuan memperoleh informasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan penelitian.²⁹

1.7.8 Keabsahan data

Keabsahan data adalah Validitas data, dalam penelitian ini akan dijaga dengan cara melakukan triangulasi data, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan perbandingan dan memverifikasi hasil data yang telah diperoleh dari sumber yang berbeda. Selain itu pengamatan serta wawancara berulang ulang akan dilakukan peneliti guna memastikan bahwa data yang diperoleh dilakukan secara konsisten.³⁰

²⁹*ibid.*hal 76-72.

³⁰ *ibid.*hal 78-83.